

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai banyak Provinsi, serta masing – masing Provinsi mempunyai beberapa daerah Kabupaten/Kota, dan di tiap Kabupaten/Kota dipimpin oleh pemerintah daerahnya sendiri yang memiliki tugas untuk mengurus urusan ataupun kegiatan daerahnya masing-masing. Setiap wilayah Kabupaten/Kota berwenang dan bertanggung jawab mengelola pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan melayani masyarakat di daerahnya masing-masing.

Pada era otonomi daerah, setiap wilayah diserahkan wewenang dalam mengelola dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Tujuannya adalah guna memperdekat layanan pemerintah kepada masyarakat serta mempermudah mereka pada pengawasan penggunaan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di samping perihal ini, otonomi ini bermaksud untuk mendorong persaingan yang sehat antar daerah (Amin, 2019). Dalam pelaksanaannya, setiap daerah diharapkan mampu mandiri pada hal pendanaan, baik untuk pembangunan maupun pengelolaan keuangan. Pembangunan sendiri merupakan proses untuk meningkatkan kualitas dari yang kurang memadai menjadi lebih baik. (Lestari et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada naiknya output produksi atau kenaikan pendapatan per kapita. Tingkat laju perekonomian yang diraih setiap tahun mencerminkan kemampuan suatu negara dalam mengendalikan ekonomi jangka pendek serta mengelola kegiatan produksi untuk jangka panjang. Hal ini dapat diartikan bahwa perekonomian sebuah negara dapat dinilai baik apabila pertumbuhan ekonomi negaranya mengalami kenaikan. Maka untuk melihat apakah suatu negara itu pertumbuhannya mengalami peningkatan mampu penurunan ditinjau melalui peningkatan pada Produk Domestik Bruto (PDB) untuk negara beserta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk

melihat peningkatan laju perekonomian di Daerah/Provinsi. PDRB mengacu pada akumulasi nilai tambah dari beragam sektor usaha di suatu daerah. Istilah ini juga menggambarkan total nilai barang beserta jasa yang setiap unit ekonomi produksi pada wilayah tersebut (Mandey et al., 2023).

Provinsi Jambi yang mempunyai 11 Kabupaten/Kota, termasuk salah satu wilayah di Indonesia yang terus berupaya mendorong laju perekonomian. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan yang bermaksud guna menyejahterakan masyarakat setempat. Tingkat PDRB pada periode tertentu menjadi indikator pertumbuhan ekonomi daerah ini, di mana perubahan pada PDRB, baik peningkatan maupun penurunan dapat memengaruhi kondisi ekonomi wilayah tersebut. Berikut adalah data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi di periode 2017-2023:

**Tabel 1.1 PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Provinsi Jambi Tahun 2017-2023 (Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (Triliun Rupiah)</b>	<b>PAD (Miliar Rupiah)</b>	<b>DP (Miliar Rupiah)</b>
2017	190,26	1,58	2,72
2018	209,45	1,66	2,75
2019	219,32	1,65	2,90
2020	207,10	1,67	3,02
2021	232,80	1,84	2,88
2022	275,69	2,16	2,53
2023	292,17	2,26	2,62
<b>Rata-Rata</b>	<b>232,40</b>	<b>1,83</b>	<b>2,77</b>

*Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024*

Tabel 1.1 memperlihatkan data PDRB, PAD dan Dana Perimbangan Provinsi Jambi tahun 2017-2023. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwasanya PDRB Provinsi Jambi mengalami kenaikan yang cukup baik dari tahun 2017-2023. Dapat dilihat di tahun 2017 penerimaan PDRB sebesar Rp 190,26 triliun, kemudian mengalami peningkatan sebesar Rp 19,19 triliun di tahun 2018. Kemudian meningkat lagi di tahun 2019 sebesar Rp 9,87 triliun. Tetapi di tahun

2020 terjadi penurunan PDRB dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp -12,21 triliun. Kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat yaitu sebesar Rp 25,69 triliun. Dilanjutkan dengan tahun 2022 meningkat kembali dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 42,89 triliun. Kemudian di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 16,48. Peningkatan PDRB Provinsi Jambi ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang baik di Provinsi Jambi selama periode tahun 2017-2023.

Pada tabel tersebut juga dapat dilihat data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi tahun 2017-2023 yang mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017 PAD Provinsi Jambi sebesar Rp 1,58 miliar. Kemudian meningkat di tahun 2018 yaitu sebesar Rp 0,08 miliar. Kemudian di tahun 2019 terjadi penurunan PAD di Provinsi Jambi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp -0,01 miliar. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 0,02 miliar. Di tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar Rp 0,17 miliar. Kemudian pada tahun 2022 terjadi lagi peningkatan yang besar yaitu sebesar Rp 0,32 miliar. Terakhir di tahun 2023 meningkat kembali sebesar Rp 0,01 miliar dan peningkatan ini tidak sebesar yang terjadi di tahun 2021 dan 2022.

Dapat dilihat juga dari tabel tersebut data Dana Perimbangan Provinsi Jambi tahun 2017-2023 mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada tahun 2017-2020 terjadi kenaikan yang signifikan yaitu dari Rp 2.72 miliar pada tahun 2017 dan Rp 3.02 miliar di tahun 2020. Tetapi di tahun 2021 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp -0,14 miliar. Kemudian di tahun 2022 terjadi penurunan kembali yaitu sebesar Rp -0,35 miliar. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 0,09 miliar.

Secara umum peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan berkontribusi positif pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dikarenakan seiring dengan pertumbuhan ekonomi wilayah aktivitas ekonomi masyarakat juga akan meningkat hingga akhirnya akan mendorong naiknya penerimaan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, ataupun dari kinerja BUMD yang semakin berkembang dan

memberikan kontribusi yang lebih besar pada PAD. Selain itu, PDRB yang disusun berdasarkan harga berlaku memberikan gambaran nyata tentang nilai tambah yang dihasilkan melalui keseluruhan aktivitas produksi barang ataupun jasa pada suatu daerah pada tahun berjalan, sehingga menjadi indikator penting dalam menilai pertumbuhan ekonomi daerah.

Otonomi daerah memberi hak pada pemerintah daerah guna mengatur urusan pemerintahan, juga memanfaatkan sumber daya wilayahnya. Dengan didasarkan pada UU No. 9 Tahun 2015, otonomi daerah mencakup hak beserta kewajiban dalam menangani urusan pemerintahan sesuai hukum. Desentralisasi, sebagai dasar otonomi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, memungkinkan daerah mengelola sumber daya dan membuat keputusan pembangunan (Suriadi et al., 2024). Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah sangat ditentukan oleh keterampilan pemerintah daerah pada pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah tersebut (Gafar, 2019). Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dengan mengelola sumber daya lokal, yang kemudian berkontribusi pada PAD. PAD ini menjadi sumber pokok pada pengeluaran daerah, selain pendapatan dari sumber lain. PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan melalui pengelolaan sumber daya lokal berdasarkan peraturan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada proses pembangunan suatu daerah, tidak hanya cukup dengan dana PAD saja untuk pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dikarenakan PAD belum mampu untuk mencukupi kebutuhan daerah. Setiap masing-masing daerah mempunyai perbedaan kemampuan keuangan pada pendanaan kebijakan pemerintahannya, hal tersebut mampu berakibat pada terjadinya ketimpangan fiskal sebuah daerah dengan daerah lainnya (Pradana, 2021). Pendapatan daerah tidak sekedar bersumber dari PAD, tetapi juga dihasilkan melalui Dana Perimbangan, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Perimbangan berasal dari APBN yang diberikan pemerintah pusat untuk meminimalisir kesenjangan fiskal antar daerah. Dana ini mendukung pelaksanaan desentralisasi dan mempercepat pembangunan daerah, dengan

harapan pemerintah daerah memanfaatkannya secara optimal untuk mendanai kebutuhan daerah (Putri, 2021).

Merujuk pada data diatas, sehingga bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah itu dapat dikatakan mengalami peningkatan apabila terdapat kenaikan PDRB dari tahun sebelumnya. Kenaikan dan Pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun itu menggambarkan ada tidaknya perkembangan perekonomian dalam suatu wilayah. Jika sektor perekonomian memberikan kontribusi yang besar kepada PDRB, hal tersebut bisa saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah kearah yang lebih baik sehingga bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Didasarkan deskripsi latar belakang diatas, penelitian ini berupaya guna mengidentifikasi apakah ditemukan kontribusi antara PAD beserta Dana Perimbangan terhadap PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Atas dasar ini, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dan Pengaruhnya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023?
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis harap penelitian ini mampu memberi kegunaan yakni:

1. Manfaat Akademisi

Temuan dalam penelitian ini penulis harapkan supaya dapat menjadi tambahan informasi bagi pembaca dan menjadi referensi bacaan serta bahan masukan yang dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak lain yang ingin menambah pengetahuan.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini harapannya mampu menjadi bahan referensi pada penelitian berikutnya mengenai korelasi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Penelitian ini juga ditujukan menjadi sumber literatur.